

Pola Harmoni Sosial Masyarakat Mataraman Di Kota Kediri

*1 **Taufik Alamin**

¹ Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

*taufikalamin25@iainkediri.ac.id

Artikel History

Submit: 25 Agustus 2021

Review: 29 Agustus 2021

Revised: 24 Oktober 2021

Accepted: 30 Desember 2021

Abstract: Since the days of the kingdom, the Kediri area has been inhabited by people from various ethnic groups, languages, religions, and beliefs. It also includes many places of worship such as mosques, churches, pagodas, temples, studios and Islamic boarding schools. The existence of these places of worship not only shows the level of plurality and tolerance of its citizens, this process also occurs over a long period of time. This study aims to reveal more deeply about the model of social integration carried out by the people of Kediri in the midst of dynamics and changes that continue to occur. This research was conducted using a qualitative method, using a case study approach in Kediri. Data was collected by using observation and interview methods and using relevant document sources. From these data, analysis and interpretation of the selected data is then carried out, to then draw a conclusion. Furthermore, the writing and construction of research results are carried out. The results of this study indicate that social integration in the Kediri community has been created in three forms of community social life, namely in the fields of slametan rituals, traditional arts and inter-religious relations. The three forms turned out to be able to become a binder for other social systems, even bridging interactions between actors and uniting them in a shared social system. The social integration model used in building social harmony is the proceduralist model and the assimilationist model.

Keywords: social harmoni, mataraman community, kediri city

Pendahuluan

Wilayah Kediri secara kultural penduduknya berasal dari suku Jawa. Data terakhir menunjukkan populasi orang Jawa di Kediri mencapai lebih dari 90%. Dominasi terhadap orang Jawa ini terasa sekali dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu ukuran dari dominannya budaya dan tradisi Jawa tersebut adalah digunakannya bahasa Jawa dalam pergaulan sehari-hari, kadang pula peneliti temukan dalam interaksi mereka dalam bidang pemerintahan dan layanan publik di Kediri. Selain itu mereka meskipun mayoritas beragama Islam, namun praktik-praktik ritual keselamatan masih rutin dilakukan, seperti dalam kelahiran, pernikahan dan kematian.

Selanjutnya dalam penelitian ini juga menemukan beberapa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Kota Kediri yang merupakan cerminan dari masyarakat yang menekankan adanya harmoni sosial. Peristiwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Harmoni sosial tersebut tercermin dalam tiga peristiwa yang telah melembaga dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga harmoni tersebut yaitu; harmoni dalam tradisi slametan, harmoni dalam berkesenian dan harmoni dalam beragama.

Istilah masyarakat mataraman dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyebut wilayah Jawa Timur bagian barat bagian selatan. Adapun yang masuk dalam wilayah mataraman tersebut antara lain; Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan, Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Sedangkan istilah mataraman sendiri telah lama digunakan oleh masyarakat dan para pengamat sosial budaya. Hal ini disebabkan pola-pola budaya yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya merupakan pengaruh dari kekuasaan kerajaan Mataram Kuno dan Mataram Islam. Dua kerajaan besar inilah yang hingga saat ini sangat terasa pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Mataraman mulai sistem religi, bahasa, organisasi sosial, maupun seni budaya. Karena besarnya pengaruh budaya dari kerajaan yang berpusat di Jogja dan Solo tersebut, wilayah ini dinamakan Mataraman.

Di sisi lain, masyarakat Kediri dikenal memiliki tingkat kerukunan antar umat beragama cukup tinggi. Hal tersebut juga didukung oleh adanya fakta bahwa tingkat toleransi antar pemeluk agama juga menunjukkan angka yang tinggi. (LPPM, 2018) Atas dasar itulah Pemerintah Kota Kediri di bawah pemerintahan walikota Abdullah Abu Bakar menetapkan Harmoni Kediri sebagai *city branding* pada tahun 2016.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang bentuk-bentuk integrasi sosial yang terjadi pada masyarakat Kota Kediri. Selain itu juga untuk mengetahui model integrasi sosial yang digunakan sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang harmonis.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti

memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. (Creswell, 2013)

Pemilihan pendekatan kualitatif didasari atas pertimbangan bahwa pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami. Dalam penelitian ini, terungkap bagaimana proses integrasi sosial masing-masing kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat Kediri. Dengan data tersebut peneliti memungkinkan untuk menyelidiki dan memaknainya secara utuh sehingga mampu memberikan penjelasan secara terinci tentang fenomena yang diteliti secara keseluruhan (Maleong, 2000).

Hasil Penelitian

Masyarakat tersusun dari beragam etnis dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu setiap etnis dan kebudayaan tersebut harus memiliki posisi dan ruang yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian setiap individu dan kelompok akan merasa dihargai hak-haknya untuk hidup bersama secara terhormat dan bermartabat. Kondisi tersebut dapat tercipta karena masyarakat memahami arti hidup bersama dengan damai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebersamaan. Dalam istilah lain, masyarakat mataraman sedang dan telah melakukan suatu proses yang disebut integrasi sosial.

Integrasi sosial diartikan sebagai suatu proses dalam masyarakat ketika setiap kelompok sosial melakukan sinergi guna melakukan kedekatan hubungan antara satu dengan yang lain dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Kelompok sosial tersebut dapat terwujud karena didasarkan pada agama, kepercayaan, adat atau tradisi, suku dan kelas. Integrasi sosial tidak selamanya dilakukan untuk menghilangkan adanya diferensi sosial, karena yang terpenting adalah adanya sebuah kesadaran untuk menjaga keseimbangan hubungan. Dengan demikian integrasi sosial merupakan penyesuaian dari beragam unsur dalam kehidupan masyarakat untuk menghasilkan pola kehidupan yang serasi dan harmonis bagi masyarakat tersebut.

William F.Ogburn dan Mayer Nimkoff lebih lanjut memberikan catatan agar proses integrasi sosial tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Pertama, harus memiliki kemampuan untuk mengisi kebutuhan masyarakat pada saat diperlukan sehingga tetap menjaga hubungan yang baik dan keterikatan satu dengan yang lainnya. Kedua, keberhasilan dalam menciptakan nilai-nilai dan norma tertentu yang digunakan sebagai

pedoman dalam melakukan interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Ketiga, nilai-nilai dan norma tersebut dapat berlaku dalam waktu yang cukup lama dan dapat dilakukan bersama-sama secara konsisten. (Susanto, 1979)

Selanjutnya untuk mengamati fenomena integrasi sosial pada masyarakat Kediri, digunakan pemetaan yang dilakukan oleh Bikhu Parekh. Dalam hal ini Parekh mengklasifikasikan tiga model integrasi yang ada di dalam masyarakat yaitu model integrasi sosial proseduralis, model integrasi sosial asimilasionis dan model integrasi sosial millet. (Parekh, 2008)

Integrasi sosial model proseduralis memandang bahwa kehidupan keberagaman dalam masyarakat adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sehingga tidak bisa dibiarkan begitu saja. Artinya diperlukan suatu kekuatan untuk menjadi penengah sekaligus mengayomi agar keberagaman tersebut dapat hidup secara berdampingan. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuasaan pemerintah. Kehadiran pemerintah tersebut sangat dibutuhkan sebagai pegangan. Dengan demikian pemerintah diharapkan mampu menciptakan aturan dalam membentuk perilaku umum bagi setiap individu dan kelompok sehingga dapat secara leluasa menjalankan aktifitasnya dengan bebas dan aman.

Sedangkan integrasi sosial model asimilasionis adalah suatu penyesuaian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial yang tidak hanya tergantung pada kekuatan struktural semata, namun lebih menekankan adanya persamaan nilai-nilai antar kelompok dalam masyarakat. Dalam pandangan model asimilasionis ini, kesatuan dalam masyarakat akan tercipta jika ada kemauan dari setiap kelompok sosial dalam membangun pola kehidupan bersama berdasarkan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Biasanya kesepakatan tersebut muncul sebagai hasil dari proses interaksi dan dialog yang intensif sehingga menghasilkan pengertian bersama sebagai dasar dalam bersikap dan berperilaku.

Selanjutnya integrasi sosial model millet berasumsi bahwa penyatuan dalam masyarakat dapat tercipta ketika kelompok minoritas diberikan ruang yang cukup leluasa untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya. Demikian pula sebaliknya, kaum minoritas tidak boleh menentang kultur dominan yang sedang berlaku di suatu masyarakat. Dalam pandangan model millet, negara tidak hanya sebatas mengakui keberadaan kelompok minoritas tetapi juga melembagakan dalam bentuk otonomi kepadanya, namun pada saat yang bersamaan mereka juga harus tunduk pada

kepentingan yang lebih besar yang biasanya melekat pada kultul dominan yang berlaku di masyarakat tersebut.

A. Integrasi Sosial dalam Ritual Slametan

Harmoni atau keselarasan dalam kehidupan masyarakat Jawa sebenarnya tidak selalu tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, karena bagi orang Jawa konsep harmoni tersebut merupakan hal-hal peta pikiran yang mampu menjiwei seluruh aspek kehidupan. Bagi sebagian besar orang Jawa berpandangan bahwa keharmonisan merupakan inti dari budaya Jawa, namun sebagian yang lain mengatakan bahwa keselarasan atau harmoni sosial merupakan cikal bakal untuk mencapai tujuan hidup yaitu hidup yang aman tentram dan sejahtera. Sedangkan kesejahteraan sendiri bisa dicapai apabila seseorang bisa melakukan keselarasan dengan lingkungan sosialnya, hubungan antara manusia dan Tuhan alam dan hubungan antar sesama manusia itu sendiri.

Selain menjunjung tinggi konsep harmoni, orang Jawa juga meyakini rukun dan rasa hormat. Dua hal tersebut masih dijunjung tinggi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ada beberapa pihak yang memang sudah meninggalkannya. Prinsip rukun dan hormat dalam masyarakat Jawa juga merupakan kaidah dasar yang paling menentukan dalam pola hidup masyarakat bagi upaya untuk mencapai keselarasan dan pemeliharaan ketertiban. Untuk mewujudkannya masyarakat Jawa cenderung untuk melakukan pengorbanan terhadap kepentingan dan ambisi pribadinya. (Mulder, 1985)

Masyarakat Jawa sangat memegang teguh kerukunan, karena bagi mereka kondisi itu harus terus dipertahankan sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat yang harmonis, tentram, aman dan tanpa menimbulkan perselisihan. Setiap orang selalu di ajarkan untuk tidak menghancurkan keseimbangan sosial demi mengejar kepentingan pribadi. Oleh karena itu masyarakat Jawa selalu menekankan sikap *nrimo* atau mempunyai sikap pasrah terhadap kekuatan yang lebih tinggi. Hal tersebut selalu disadarinya karena merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan hormat adalah nilai yang sangat berhubungan dengan orang lain. Dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan sebuah etika pergaulan dengan orang lain.

Masyarakat Kediri utamanya di wilayah perkotaan, mayoritas penduduknya adalah suku Jawa. Dalam kehidupan keagamaannyapun memang tidak lepas dari pengaruh nilai, norma dan pandangan budaya Jawa, baik dari golongan masyarakat santri maupun yang

abangan. Islam Abangan dalam memaknai agama Islam hanya pada aspek ritual tertentu, selebihnya mereka lebih banyak menggunakan pandangan-pandangannya yang bersumber dari kebiasaan dan adat budaya nenek moyang. Kelompok ini memiliki pandangan bahwa untuk urusan dunia sosial, cukup diselesaikan berdasarkan kebiasaan budaya tanpa melibatkan agama, sehingga agama hanya mengurus hal-hal yang bersifat khusus pribadi. Kelompok Islam Abangan sangat percaya pada adat istiadat Jawa. Hingga ada julukan dari pihak lain, mereka merupakan kelompok kejawen.

Dari pengamatan penulis kelompok abangan atau kejawen ini masih cukup banyak di Kediri. Meskipun secara ritual mereka tidak lagi melaksanakan tata cara ritual paling tidak secara terang-terangan sebagaimana yang digambarkan Clifford Geertz.(1960). Tetapi mereka masih mempercayai upacara-upacara dalam siklus kehidupan seperti kelahiran; mitoni, selapanan, perkawinan, kematian; mendak 7 hari, 40 hari, 100 hari hingga 1000 hari meninggalnya seseorang, Begitupun juga dalam hal perkawinan masih banyak ditemukan keluarga-keluarga yang menggunakan upacara tradisi temanten yang menggunakan tata cara orang Jawa. Misalnya tradisi lamaran, sisetan, temu manten, pitonan dan lain sebagainya. Meski begitu dalam perkembangannya praktek-praktek ritual tersebut sudah bersifat kolaboratif yaitu bersama-sama dengan kelompok Islam santri.

Kolaborasi antara Islam abangan dan Islam santri dapat berupa do'a bersama atau acara ngirim do'a kepada arwah. Dalam hal acara pengiriman doa arwah tersebut banyak ditemukan dalam keluarga Islam abangan dengan mengundang kelompok yasinan dan tahlil ke rumahnya, minta dido'akan agar hajatnya bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pihak tuan rumah menyediakan hidangan untuk dimakan bersama dan nasi berkat untuk dibawa pulang kelompok Islam santri dengan maksud diberikan kepada keluarganya di rumah.

Disamping itu, ada tradisi kelompok abangan yang sebagian kecil masih dilakukan secara turun temurun yakni memberikan sesaji di pertigaan dan perempatan jalan. Tradisi ini mereka lakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain, bahkan terkesan dilakukan secara diam-diam. Artinya tradisi ini dilakukan oleh masing-masing individu dan tidak secara kolektif sebagaimana upacarayang terkait dengan siklus kehidupan tadi. (Geertz C. , 2013)

Dari gambaran di atas, apabila dikaitkan dengan temuan Clifford Geertz dalam bukunya *Agama Orang Jawa*, maka karakter kelompok abangan maupun santri, atau lebih tepatnya antara orang Islam abangan dan Islam santri sudah jauh berbeda kondisinya

dibandingkan dengan saat penelitian tersebut dilakukan yakni tahun 1960-an. Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek ritual dan perilaku keagamaannya saja, tetapi juga terjadi pada wilayah relasi antar keduanya yang tidak lagi bersifat antagonis, tetapi sudah berubah menjadi sinergis bahkan terkesan integral antara satu dengan yang lainnya.

Salah satu contoh untuk menjelaskan kondisi tersebut antara lain banyak kelompok abangan karena dirasa mampu secara finansial telah melakukan haji. Bahkan mereka yang sudah berhaji tersebut dengan tidak malu-malu menyebutkan titel hajinya di depan namanya. Atau secara lisan mereka bangga jika dipanggil dengan sebutan pak haji. Sebaliknya bagi kelompok santri hubungannya dengan kelompok abangan semakin dekat dan akrab. Hal ini disebabkan kaum abangan lebih dekat dengan tata cara keagamaan yang dimiliki kelompok santri dibandingkan model keagamaan kelompok Islam perkotaan.

Dalam kenyataannya, memang orang-orang Islam abangan ini dalam hal beribadah akhirnya secara alamiah menjadi bagian dari jamaah orang Islam santri. Dimana dalam setiap kegiatan ritual seperti sholat jamaah, pengajian, yasinan dan tahlilan, santrilah yang menjadi pemimpinnya. Apalagi dalam banyak tempat ditemukan orang santri tersebut juga sekaligus merupakan pemimpin ormas keagamaan, atau memiliki masjid atau madrasah.

Selanjutnya, masih terkait dengan siklus kehidupan, yang menyangkut tempat tinggal dan mata pencaharian, masyarakat Islam abangan di Kota Kediri setiap tahunnya masih mengadakan ritual bersih desa atau *nyadran*. Ritual ini bertujuan sebagai bentuk syukur terhadap bumi dan alam semesta yang telah memberikan rejeki dan kehidupan pada penduduk di suatu desa. Biasanya kegiatan yang banyak diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat ini dipusatkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti makam, pohon besar, dan sumber mata air atau sendang. Mereka mempercayai bahwa ketika ritual ini dilaksanakan, akan menjadi sarana tolak balak, namun sebaliknya jika tidak dilakukan akan mendatangkan bencana dalam kehidupannya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah seorang warga Blabak, Sukijo (49) sebagai berikut:

“*Nyadran* ini dilakukan secara rutin dan turun-temurun, masyarakat mempercayai bahwa dengan kegiatan ini sebagai cara berterima kasih kepada yang babat alas desa dan kepada Gusti Allah.. *Nyadran* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua hasil panen seperti polo gumantung, polo kependem. Setelah semua itu dido’akan nantinya juga

dibagikan kepada mesyarakat juga”. Kata Sholikin warga Kaliombo.(Wawancara, 12 Desember 2020)

Dalam praktiknya pelaksanaan kegiatan nyadran atau sedekah bumi, atau secara umum disebut juga bersih desa, dilakukan oleh seluruh warga dusun tanpa pandang bulu. Dalam acara bersih desa yang biasanya telah ditetapkan sebelumnya, sehingga setiap orang wajib mengagendakan agar pada hari H dapat ikut serta, hadir dan berkumpul dengan warga yang lainnya. Setiap keluarga menyediakan nasi berkat yang akan dibawa saat acara tersebut digelar. Pada hari itu semua warga menyiapkan makanan khas tersebut untuk dibawa dan diberikan kepada warga lain sebagai sedekah setelah sebelumnya dibacakan do’a–do’a oleh tokoh adat dan tokoh agama.

Dalam melakukan ritual bersih desa tersebut, tokoh dusun yang biasanya dituakan dan dihormati, akan memimpin jalannya upacara hingga selesai. Semua warga berkumpul dan secara seksama mendengarkan ijab, atau ikrar yang diucapkan pemimpin desa. Ikrar diucapkan dengan menggunakan bahasa Jawa, tepatnya bahasa Jawa inggil, yang bagi generasi muda belum tentu tahu artinya tersebut, tetapi secara hikmat diikuti oleh semua warga yang hadir. Di akhir acara selanjutnya dilakukan do’a yang dipimpin oleh salah seorang tokoh agama Islam. Sudah pasti kalau doa tersebut diucapkan dengan menggunakan bahasa arab sebagaimana tuntunan syariat Islam. Setelah do’a dipanjatkan giliran ada sambutan dari pejabat RT atau RW yang menegaskan pentingnya tradisi dan kegiatan tersebut dipertahankan. Bukan hanya karena acara tersebut dilakukan karena setahun sekali, tetapi memiliki pesan khusus bahwa tradisi dan ritual itu sendiri menyangkut keberlangsungan dan keselamatan seluruh warga desa.

Rangkaian paling akhir dari kegiatan ritual bersih desa adalah pembagian berkat dan makan bersama. Dalam acara makan bersama ini sebagian warga ada yang langsung pulang dengan membawa bagian berkatnya, dan sebagian yang lain makan bersama dengan cara *muluk*, yaitu makanan diletakkan di nampan lalu dimakan bersama oleh sejumlah orang. Puncak dari acara bersih desa adalah panggung hiburan rakyat yang dilaksanakan sore hingga malam hari. Biasanya mereka menampilkan kesenian rakyat atau kesenian tradisional yang berupa jaranan atau wayangan. Biaya penyelenggaraan dari rangkaian acara tradisi tersebut dihimpun dari warga masyarakat sendiri dengan cara iuran.

Jika dilihat dari gambaran fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa perasaan senasib dan sepenanggungan antar warga Kota Kediri masih kuat. Ikatan solidaritas

sebagai bagian dari keluarga besar masih sangat terasa. Kondisi tersebut hampir sebagaimana besar dilakukan oleh warga Kota Kediri. Utamanya bagi warga kelurahan yang di dalamnya masih terdapat punden atau tempat yang disakralkan, maka kegiatan nyadran atau bersih desa ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Dengan demikian, kemampuan masyarakat dalam membangun solidaritas sosial yang masih tinggi tersebut yang oleh Emil Durkheim disebut solidaritas mekanik, hal tersebut dikarenakan masyarakat masih memiliki rasa kebersamaan yang lebih besar dibandingkan kepentingan masing-masing warganya. Rasa kebersamaan yang tinggi tersebut biasanya ditandai dengan keharusan untuk hadir dalam setiap acara bersama, termasuk kegiatan bersih desa yang momentumnya dilaksanakan setahun sekali ini - menjadi ukuran tersendiri bagi setiap orang sebagai warga desa bahwa ia masih guyub dan memiliki empati dengan yang lain. Artinya komitmen kebersamaan setiap orang dapat dilihat dari keaktifan yang bersangkutan untuk selalu hadir dalam setiap kegiatan desa.

Dengan gambaran pelaksanaan ritual bersih desa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ternyata bukan hanya didominasi oleh kalangan masyarakat abangan saja. Tetapi dalam penyelenggaraannya telah melibatkan kelompok masyarakat santri untuk ambil bagian di dalamnya. Bahkan dalam perkembangan lima tahun terakhir yang peneliti amati sendiri, ritual *slametan* ini justru banyak dilakukan oleh kelompok santri yang ternyata frekuensinya jauh melampaui apa yang dilakukan oleh kelompok abangan sendiri.

Bedanya, kalau kegiatan *slametan* ini dilakukan dengan mengundang kelompok santri sendiri namanya diganti menjadi acara syukuran atau tasyakuran. Bedanya kalau ritual yang dilakukan oleh kelompok abangan saja biasanya menggunakan mantra-mantra dengan bahasa Jawa dan dilengkapi dengan sesajen, sedangkan jika acara tersebut dilakukan oleh kelompok santri maka dinamakan dengan acara tahlilan, yasinan atau manaqiban. Sedangkan makanan yang disuguhkan pun juga bebas dan tidak ada syarat syarat khusus. Acara ini biasanya diadakan bersamaan dengan momentum kematian atau kelahiran bayi. Bahkan tidak jarang pula dilakukan menjelang acara akad nikah atau perkawinan. Yaitu dengan cara mengundang tetangga sekitar untuk membaca tahlil dan doa bersama di kediaman tuan rumah.

Konsep harmoni sosial yang terkandung dalam tradisi bersih desa dapat dilihat dari makna-makna yang terkandung dalam tradisi bersih desa. Dalam tradisi bersih desa sebagaimana yang telah dijelaskan, selain terdapat unsur harmoni sosial yang dapat

dilihat dari prosesi atau pelaksanaan tradisi bersih desa adalah sebagai acara yang menggambarkan falsafah kehidupan orang Jawa yang gotong royong dan kehidupan yang penuh kerukunan dan ketentraman, serta mampu hidup damai ditengah-tengah masyarakat yang pluralis.

Harmoni sosial dalam pelaksanaan *slametan* bersih desa selain disimbolkan dalam beragam tata upacara dan sarana ritual juga diwujudkan dalam bentuk interaksi sosial antar berbagai elemen masyarakat yang berbeda keyakinan, agama, kelas sosial dan kelompok sosial di masyarakat Kota Kediri. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya harmonisasi tersebut adalah masih kentalnya nilai-nilai dan tradisi Jawa dalam masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, meskipun pola kehidupan masyarakat Kota Kediri yang telah mengalami perubahan ke arah masyarakat urban dan mulai berlangsung proses industrialisasi, namun dalam kehidupan ritual dan tradisi Jawa masih dipertahankan dan menjadi cara pandang yang cukup dominan hingga penelitian ini dilakukan.

B. Integrasi Sosial dalam Berkesenian

Salah satu seni tradisi masyarakat Jawa abangan di Kota Kediri adalah jaranan. Salah satu yang menjadi ciri khas dari kesenian yang menggunakan property jaran kepanung ini adalah adanya ritual sebelum kesenian ini pentas. Ritual yang dimaksud adalah dengan menggunakan mediasi roh-roh atau makhluk halus dengan membakar dupa. Jaranan pada jaman dahulu adalah selalu bersifat sakral. Maksudnya selalu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Selain untuk tontonan, pada jaman dahulu jaranan juga digunakan untuk upacara-upacara resmi yang berhubungan dengan roh-roh leluhur keraton. Pada jaman kerajaan dahulu jaranan seringkali ditampilkan di keraton.

Dalam kehidupan sehari-harinya para seniman jaranan adalah orang-orang abangan yang masih taat kepada leluhur. Mereka masih menggunakan *danyang* atau *punden* sebagai sesuatu yang dikeramatkan. Artinya mereka masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap roh-roh nenek moyangnya. Sehingga mereka juga masih melaksanakan praktik-praktik slametan seperti halnya dilakukan oleh orang-orang terdahulu.

Sedangkan jika dilihat dari segi starta sosial, seniman jaranan pada umumnya adalah para pekerja kasar. Mereka sebagian besar bermata pencaharian di sektor informal misalnya satpam, pedagang pasar, sopir, tukang becak, buruh bangunan, buruh

pabrik, dan tukang kayu dan lain sebagainya. Sebagian yang lain bekerja sebagai penjual makanan ringan di pinggir -pinggir jalan di perkotaan, di pasar, terminal dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Dalam perkembangan zaman yang terus berubah, keberadaan kesenian jaranan juga terus mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan kondisi social masyarakat yang sudah berubah dalam memaknai dan mengembangkan jaranan. Dari tahun-ke tahun jaranan mulai berubah dari yang sifatnya tuntunan menjadi tontonan dan yang paling menarik adalah jaranan sebagai alat untuk menarik simpatisan dan untuk pengembangan pariwisata.

Clifford Gertz mengidentifikasi mereka dengan sebutan abangan. Gertz memberikan penjelasan tentang praktik abangan. Masyarakat abangan adalah suatu sekte politio-religius dimana kepercayaan jawa asli melebur dengan Marxisme yang Nasionalistis yang memungkinkan pemeluknya sekaligus mendukung kebijakan komunis di Indonesia. Sambil memurnikan upacara-upacara abangan dari sisa-sisa Islam (Geertz C. , 2013).

Pada masa Orde Baru hubungan kelompok jaranan dengan santri sempat terjadi ketegangan. Namun seiring dengan perkembangan waktu, apalagi setelah masa reformasi, akhirnya kedua kelompok ini saling memahami satu dengan yang lainnya. Memang keberadaan seni tradional di Indonesia pada umumnya selama Orde Baru selalu distigma sebagai kesenian rakyat yang pro komunis dan berafiliasi dengan PKI.

Di Kediri yang seni tradisinya adalah jaranan juga menghadapi situasi yang sama, selalu diawasi dan distigma sebagai bekas binaan partai terlarang. Kalaupun diperbolehkan hidup, gerak dan manajemennya selalu dikontrol oleh pemerintah bahkan oleh aparat militer. Saat itu jaranan Kediri diperbolehkan pentas namun harus dipimpin oleh pejabat militer saat itu, yang secara kebetulan orang tersebut juga sedang bertugas di Kediri, namanya Pak Samboyo. Setelah itu nama kelompok jaranan juga diganti sesuai dengan nama pemimpinannya, yakni kelompok jaranan Samboyo Putro.

Bukti dari adanya saling pengertian antara kelompok abangan dan santri ini antara lain, saat datangnya bulan ramadhan, semua kelompok kesenian jaranan di Kota Kediri yang berjumlah tidak kurang dari 70 kelompok ini berhenti pentas. Artinya selama sebulan mereka tidak ada pementasan di Kediri maupun di kota lain. Hal ini dilakukan sebagai wujud menghormati kaum muslim yang sedang berpuasa di bulan ramadhan. Sedangkan dari sisi pesantren memberikan keleluasaan bagi kelompok jaranan untuk

pentas asalkan tidak terlalu dekat dengan lokasi pondok pesantren. Dengan kondisi tersebut akhirnya hubungan kelompok santri dengan kelompok abangan di Kota Kediri dapat berjalan dengan damai dan kondusif. Kalaupun ada masalah dalam pementasan jaranan, biasanya berupa perkelahian atau keributan yang terjadi antar penonton jaranan. Hal ini bisa dimaklumi mengingat dalam setiap pertunjukkan jaranan senantiasa dikerumuni massa. Itupun sekarang sudah jarang terjadi, karena adanya tingkat kesadaran masyarakat dan antisipasi yang dibuat oleh pihak keamanan.

Menurut Clifford Geertz, masyarakat Jawa dalam kehidupan keagamaan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Islam Abangan dan kelompok Islam Santri. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan terlebih dahulu tentang kelompok Islam Abangan. Berdasarkan analisis Geertz tersebut, peneliti mencoba mengkomparsikan dengan perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat penelitian ini dilakukan. Jaranan yang asal-usulnya sebagai tradisi masyarakat abangan memang benar adanya. Sebab dalam kesenian jaranan ada syarat dan prosedur yang harus dilakukan oleh para pemainnya jika ingin menjadi seorang seniman jaranan sejati. Salah satu syarat ketika akan pentas di suatu tempat, terlebih dahulu harus melakukan ritual sesaji di tempat punden baik itu makam, sendang, atau petilasan di wilayah sekitar tempat pentas. Dalam bahasa jawa mereka harus *kulo nunun* terlebih dahulu kepada *danyang* desa. Tujuannya agar dalam pementasan diberikan kelancaran dan keselamatan.

Selain itu, dalam pementasanpun ada adegan yang disebut *ndadi* yaitu kondisi yang sengaja diciptakan agar bisa trance. Lewat kondisi trance inilah para pemain jaranan memanggil makhluk halus untuk bisa membantu dalam pertunjukkan. Bentuknya bisa diberi kekuatan untuk menari hingga durasi yang sangat lama, atau para pemain bisa memeragakan kekuatan diluar kemampuan manusia biasa, misalnya bisa kebal dari senjata tajam, memakan kaca, hingga ada juga yang membunuh ayam dan meminum darahnya. Hal tersebut dilakukan pemain tanpa kesadaran, atau sejenis kesurupan tetapi dikontrol pergerakannya melalui tabuhan gamelan yang menjadi iringannya.

Jika dikaitkan dengan temuan Geertz tersebut memang benar, bahwa salah satu karakter kelompok abangan adalah kebiasaannya dalam melakukan ritual *sesajen* dengan memanggil roh-roh halus nenek moyang. Jika dilihat dari latar belakang sosial budaya dan kebiasaan hidup sehari-hari, memang semua pemain adalah abangan. Secara formal agama mereka adalah Islam. Sebagaimana kata Geertz, mereka adalah Islam minimalis atau Islam KTP. Yaitu model keberagamaan yang tidak menjalankan tuntunan agama secara menyeluruh sebagaimana yang ditentukan dalam syariat Islam seperti sholat,

puasa, zakat dan haji. Tetapi mereka manaka ditanya tentang agamanya, mereka akan menjawab dengan jelas dan tegas bahwa ia adalah orang Islam atau muslim.

Gambaran di atas berbeda dengan kondisi yang terjadi di kalangan penonton jaranan. Jika dilihat dari latar belakang keagamaan - yang ditunjukkan melalui perilaku dan busana yang mereka pakai, bahwa sebagian penonton jaranan hingga penelitian ini dilakukan adalah berasal dari 2 kelompok. Yang pertama adalah berasal dari kalangan muslim abangan, sama dengan kondisi para pemainnya, sebagaimana telah digambarkan sebelumnya. Sedangkan kelompok kedua adalah penonton yang berasal dari kalangan muslim santri. Memang jika diteliti lebih mendalam hanya satu dua orang yang benar-benar berasal dari kaum santri atau pondok pesantren. Tetapi mayoritas dari mereka adalah orang-orang abangan baik secara ideologis maupun sosiologis, meskipun mereka juga menjalankan syariat agama Islam seperti sholat dan puasa. Singkatnya, mereka adalah orang muslim abangan. Bahwa mereka juga sangat senang terhadap kesenian jaranan dan aktif menonton di manapun jaranan dipentaskan, tetapi pada saat yang bersamaan mereka juga menjalankan rukun Islam dalam kehidupannya seperti sholat, puasa, dan membayar zakat pada bulan ramadhan.

Meskipun demikian, hubungan antara komunitas jaranan dan pesantren seringkali pada masa lalu terjadi ketegangan. Kondisi tersebut berjalan fluktuatif. Dalam beberapa hal mereka bersitegang karena perbedaan prinsip. Maka dalam kondisi demikian, antara jaranan dengan pesantren nampak tidak seiring dan bergerak saling menjauhi. Karena pada umumnya baik santri dan kyai tidak sepakat dengan adanya jaranan. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah karena penggunaan makhluk halus dalam setiap pementasannya. Mensikapi hal demikian dari para pelaku jaranan juga melakukan pembelaan, sebagai mana pandang Suratini salah seorang pemimpin kelompok jaranan mengatakan demikian:

“Dari kalangan santri kurang sepakat dengan tradisi jaranan. Maka untuk menjaga keselamatan, saya dalam setiap pertunjukan saya harus meminta izin terlebih dahulu dari pihak keamanan setempat. Hal ini kami lakukan agar kami selaku seniman bisa terlindung dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya kesenian ini untuk kesenangan dan tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi jangan dicampuradukan dengan agama. Saya berharap harus ada keseimbangan antara seniman dengan pihak pesantren. Dan tidak harus berdebat tentang keberadaan masing-masing.” (Wawancara, 3 September 2019)

Dalam kesempatan yang lain peneliti juga mewancarai salah seorang pemimpin kelompok jaranan yang berdomisili di Kelurahan Bandarlor. Ia menceritakan bahwa para seniman jaranan jika dimata pengasuh pondok pesantren Wahidiyah cenderung diberi ruang dan tidak memberikan larangan atau mengharamkan. Bahkan dalam banyak kesempatan para seniman jaranan yang bertempat tinggal disekitar pondok bisa berinteraksi dengan baik dengan kiainya. Tidak jarang pertemuan tersebut dilakukan di warung kopi di gang kampung dekat pondok. Dari pertemuan informal tersebut akhirnya terjalin pengertian antara kelompok jaranan dengan pondok pesantren. Ia juga menyadari bahwa hubungan baik tersebut belum tentu berlaku untuk pesantren lain. Pada umumnya hubungan pesantren dengan kesenian jaranan di Kota Kediri tidak ada masalah. Artinya kondusif dan saling menjaga. Meskipun jika dilihat dari luar, keduanya berjalan sendiri-sendiri. Tetapi tidak sampai menimbulkan konflik yang serius dan menimbulkan permusuhan.

Dalam pandangan teori struktural fungsional, konflik dan ketegangan harus semaksimal mungkin dihindari. Sebab konflik selain akan merusak tatanan sosial bersama, ia juga akan menimbulkan disharmoni dalam masyarakat. Akibatnya peran dan fungsi dari elemen sosial yang lain tidak dapat terintegrasi menjadi kekuatan yang menyatukan. Sedangkan dalam pandangan struktural fungsional masyarakat adalah kumpulan dari berbagai elemen atau unsur yang ada di dalamnya dan mempunyai keterkaitan dan ketergantungan dengan yang lain. (Ritzer, 2007)

Dengan demikian keberadaan kesenian tradisional jaranan di Kediri merupakan bagian dari sistem pelebagaan sosial. Sehingga secara struktural ia berfungsi dan saling berhubungan dengan sub-sub sistem yang lain. Secara fungsional kesenian tradisional ini berfungsi sebagai simbol untuk membentengi masyarakat desa agar tidak terjerumus pada tindakan yang merusak kerukunan dan kedamaian yang selama ini dirasakan masyarakat. Dalam konsep harmoni sosial sebagaimana yang disampaikan Talcot Parson, selalu berupaya mempertahankan unsur-unsur dalam sistem masyarakat tetap berfungsi. Dengan berfungsinya sistem-sistem tersebut termasuk sistem kesenian dan keyakinan, eksistensi komunitas dalam masyarakat tersebut dapat dipertahankan. (Liliweri, 2016)

C. Integrasi Sosial dalam Hubungan Antaragama

Secara teritorial wilayah Kota Kediri memang tidak dapat dikatakan luas, bila dibandingkan wilayah-wilayah lain di Jawa Timur. Tetapi kondisi riil masyarakat Kota Kediri menunjukkan bahwa keberagaman latar belakang masyarakatnya sangat mencolok. Ada beberapa etnis di kota tahu ini antara lain Jawa, Cina, Madura, Batak, Ambon, Arab, bugis dan lain sebagainya. Keberadaan etnis-etnis tersebut tidak semuanya mengelompok di suatu tempat, tetapi juga banyak yang menyebar dan membaaur dengan etnis yang lain.

Selain etnisitas, di Kota Kediri juga banyak berkembang faham keagamaan dan kepercayaan. Dalam rumpun Islam saja ada Nahdlatul ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad dan Ahmadiyah. Satu hal lagi yang membedakan Kota Kediri dengan daerah lain yaitu tempat berdirinya organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan organisasi pengamal sholawat Wahidiyah. Kedua organisasi tersebut berpusat di Kediri. Dalam setiap bulan tertentu selalu dibanjiri ribuan anggotanya yang datang kota-kota lain di Indonesia. Selain kedua organisasi sosial keagamaan tersebut di Kediri juga merupakan tempat lahir dan berkembangnya aliran kebatinan atau penghayat kepercayaan. Beberapa kelompok kebatinan yang dapat disebutkan di sini antara lain Saptadarma, Ngesti Tunggal, Sumarah, dan Budhi Luhur.

Selain Islam yang merupakan agama mayoritas bagi masyarakat di Kota Kediri, terdapat agama lain yang keberadaanya sejak zaman kolonial bahkan pada masa kerajaan Daha Kediri jaman dulu, yaitu Hindu, Budha, Khonghucu, Kristen dan Katholik. Wujud keberadaan umat beragama yang sangat plural ini diperkuat dengan banyaknya tempat peribadatan dan lembaga pendidikan seperti masjid, pondok pesantren, mushola, gereja, pura, wihara dan klenteng.

Meskipun perbedaan agama, etnis dan kepercayaan di Kota Kediri sangat tinggi, tetapi toleransi dan kerukunan tetap terjaga dengan baik. Salah satu buktinya adalah saat terjadinya krisis ekonomi dan politik di Indonesia tahun 1997. Pada awalnya di kota-kota besar terjadi aksi massa menuntut perbaikan sistem ekonomi dan politik. Akibatnya banyak pengusaha melarikan modalnya ke luar negeri. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan rakyat akhirnya merebak di hampir semua kota di Indonesia. Semula aksi unjuk rasa yang hanya sebatas menyampaikan tuntutan berkembang menjadi kerusuhan dan pembakaran terhadap fasilitas umum, pertokoan, gedung-gedung pemerintahan,

rumah, dan kendaraan dinas maupun pribadi. Kekerasan demi kekerasan terus berlanjut hingga jatuhnya korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit jumlahnya.

Di Kediri situasi dan kondisi saat itu juga ikut terdampak, meski tidak sampai menimbulkan kerusuhan dan memakan korban jiwa dan harta benda, namun demonstrasi oleh mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Kediri hampir dilakukan setiap hari. juga seringkali dilakukan.

Menyadari semakin besarnya kekwatiran masyarakat terjadinya konflik sosial ditambah lagi semakin sulitnya mengendalikan rasa keputusasaan masyarakat yang semakin meluas karena himpitan problem sosial dan ekonomi akibat krisis moneter, maka timbulah kesadaran dalam benak para tokoh agama dan pengusaha yang ada di Kota Kediri untuk melakukan komunikasi sebagai langkah antisipasi agar terhindar dari konflik dan kerusuhan sosial yang menakutkan tersebut.

Dalam kondisi yang penuh dengan kegaduhan tersebut, KH Anwar Iskandar salah seorang tokoh ulama Kediri memanggil beberapa tokoh masyarakat dan pemuda untuk melakukan sharing dan diskusi mensikapi situasi dan kondisi masyarakat saat itu. Acara pertemuan tersebut diharapkan menjadi pintu awal untuk memahami suasana kebatinan para tokoh agama dan umatnya serta menyusun langkah-langkah ke depannya secara bersama-sama.

Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 10 Mei 1998 bertempat di kediaman KH Anwar Iskandar pondok pesantren Ngasinan, Ngronggo Kota Kediri. Adapun yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain KH Imam Yahya Malik (pengasuh pondok pesantren Al Ma'ruf), Amin Djunaidi (pengusaha/Kristen), Budhi Dharma (pengusaha/GKI), Sholahuddin (PMII), Abdul Halim Moestafa dan Ahmad Subakir, keduanya dari NU. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mengadakan kegiatan dalam bentuk pawai keliling kota yang diikuti oleh semua tokoh dan pemeluk agama. Dalam pertemua tersebut juga diharapkan masing-masing tokoh dan umat agama memakai atribut dan pakaian keagamaan. Dengan begitu masyarakat akan mengetahui bahwa antar tokoh agama di Kediri dapat berdampingan hidup rukun dan damai tanpa menimbulkan konflik serta kekerasan. (Subakir, 2003, hal. 86)

Waktu terus berjalan seiring dengan situasi pergolakan di Jakarta semakin hari semakin memanas. Aksi kerusuhan, penjarahan, pembakaran toko-toko dan fasilitas umum, bahkan pemerkosaan terhadap etnis Cina terjadi kian marak di ibu kota. Tanggal 19 Mei 1998 telah terjadi pembakaran Yoga Plasa di kawasan Jatinegara Jakarta hingga merenggut korban jiwa sebanyak 126 orang. Situasi semakin tidak menentu, sementara

demonstrasi mahasiswa di seluruh kota di Indonesia sudah sulit untuk dikendalikan. Di Jakarta sendiri demonstrasi tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa tetapi sudah melibatkan masyarakat. Demonstrasi tersebut dilakukan setiap hari tanpa berhenti. Akhirnya tanggal 21 Mei 1998, masyarakat dikejutkan dengan pengunduran Soeharto sebagai presiden RI dan jabatan tersebut diserahkan kepada BJ. Habibie sebagai penggantinya.

Di Kediri para tokoh agama, penghayat kepercayaan dan pengusaha melakukan pertemuan yang dikemas dengan kegiatan Do'a Bersama Komponen Umat Beragama. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan kekuatan moril bangsa Indonesia pada umumnya dalam menghadapi cobaan berat sebagai bangsa yang beragama. Acara tersebut juga sebagai pelipur lara dan dorongan spiritual bagi keluarga korban kerusuhan di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia.

Kegiatan do'a bersama akhirnya dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1998 yang bertempat di kampus Universitas Islam Kediri. Do'a bersama tersebut dihadiri dari berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Kediri. Baik pemuka agama maupun umat berdatangan untuk melakukan kegiatan yang sudah disepakati sebelumnya. Jumlah peserta yang hadir dalam acara tersebut sebanyak 2000 orang yang berasal dari umat Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan penghayat kepercayaan.

Setelah acara selesai masing-masing tokoh agama meakukan pembicaraan terkait dengan perkembangan situasi terakhir. Mereka juga sepakat untuk melestarikan dan melanjutkan acara-acara serupa di masa-masa mendatang. Untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi, maka disepaki untuk mendirikan wadah kerukunan tersebut dengan nama Paguyuban Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan. Bentuk dari kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk piagam kerukunan antar umat beragama yang ditanda tangani oleh tokoh lintas agama dan penghayat kepercayaan di Kediri.

Selain didasari oleh nilai-nilai Jawa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam kehidupan keagamaanpun juga mengalami perubahan pola hubungan yang signifikan. Saat awal reformasi banyak terjadi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya kekuatiran bagi kalangan tokoh agama dan pengusaha di Kota Kediri agar kejadian tersebut tidak menjalar ke Kota Kediri.

Dalam hal keagamaan, selain Islam yang merupakan agama mayoritas bagi masyarakat di Kota Kediri, terdapat agama lain yang keberadaanya sejak zaman kolonial

bahkan pada masa kerajaan Daha Kediri jaman dulu, yaitu Hindu, Budha, Khonghucu, Kristen dan Katholik. Wujud keberadaan umat beragama yang sangat plural ini diperkuat dengan banyaknya tempat peribadatan dan lembaga pendidikan seperti masjid, pondok pesantren, mushola, gereja, pura, wihara dan klenteng.

Hingga akhirnya dalam rangka untuk mengadakan pertemuan antar tokoh dan masyarakat lintas etnis dan agama diadakan pertemuan awal pada tanggal 10 Mei 1998 yang bertempat di kediaman KH Anwar Iskandar pondok pesantren Ngasinan, Ngronggo Kota Kediri. Dari pertemuan awal tersebut akhirnya melahirkan suatu gagasan untuk mendirikan paguyuban antar umat beragama dan penghayat kepercayaan atau yang disingkat PAUB-PK. Acara tersebut dideklarasikan pada tanggal 28 Juli 1998 di aula Universitas Islam Kadiri (UNISKA).

Menurut KH. Anwar Iskandar, misi dibentuknya wadah paguyuban kerukunan antarumat beragama dan penghayat kepercayaan tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari keikutsertaan tokoh umat beragama secara aktif dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya kehidupan antarumat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian fungsi paguyuban antar umat adalah sebagai wadah yang menjalankan aktifitasnya berdasarkan nilai-nilai yang substatif dan membantu penanaman nilai etik dan berakibat pada pendidikan masyarakat. Adapun kriteria dari sebuah tata nilai yang dimaksud dapat mewujudkan harapan paguyuban sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan advokasi antar pimpinan dan umat beragama dan penghayat kepercayaan, menjaga persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta bergerak di bidang sosial dan tidak akan melakukan kegiatan politik praktis dalam berbagai bentuk. (Subakir, 2003, hal. 92)

Dalam perkembangannya, wadah paguyuban antar umat beragama dan penghayat kepercayaan tersebut telah mampu melaksanakan agenda rutin yaitu berupa pertemuan setiap malam jum'at kliwon. Pertemuan ini tidak hanya dihadiri oleh para pemuka agama dan aliran kepercayaan, namun dihadiri pula para pengusaha, pemimpin pemerintahan yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOMPINDA) seperti Kodim 0809, Polres Kediri Kota, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri. Demikian pula para tokoh pemuda dan anggota dari organisasi sosial kemasyarakatan seperti NU, MUI, Muhammadiyah, LDII, BAMAG, KNPI, WALUBI juga selalu hadir dalam pertemuan

tersebut. Sejak berdirinya hingga sekarang, agenda pertemuan PAUB-PK telah menjadi wadah interaksi sosial bagi semua komponen masyarakat yang ada di Kota Kediri, dan telah mampu menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi antar unsur masyarakat di Kota Kediri.

Di tingkat elit pemerintahan dan tokoh masyarakat, semenjak Kota Kediri dipimpin walikota Ahmad Maschut, hubungan dengan para tokoh masyarakat, pengusaha dan pemuka agama, dan pengasuh pesantren mulai dibangun. Salah satu bentuknya adalah dilibatkannya tokoh-tokoh masyarakat dalam pemerintahan, misalnya saat pelaksanaan sidang paripurna pemilihan walikota Kediri oleh anggota DPRD Kota Kediri. Adalah suatu yang tidak lazim saat itu, sidang paripurna yang biasanya hanya melibatkan para anggota DPRD, namun saat itu justru mengundang para tokoh masyarakat dan pemuka agama. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Halim Moestofa mantan anggota DPRD Kota Kediri sebagai berikut:

“Sejak periode lima tahun pertama, walikota pak Maschut memang berhasil melakukan pendekatan dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Banyak pendekatan yang beliau lakukan terbukti berhasil dan diakui sebagai pemimpin yang mengayomi masyarakat. Untuk pemuda dan olah raga beliau berhasil memajukan Persik. Karena melihat pola kepemimpinan pak maschut bisa diterima oleh banyak kalangan, maka untuk periode lima tahun berikutnya para tokoh dan elit agama sepakat mendukung beliaunya maju lagi sebagai walikota untuk kedua kalinya. Dan sebagai apresiasi terhadap dukungan tersebut para tokoh tersebut dundang dalam sidang paripurna pemilihan walikota Kediri. Kami saat itu sebagai anggota dewan menyetujuinya. Meskipun keberadaannya saat itu hanya sebatas menyaksikan.”

Gambaran sebagaimana yang telah disampaikan Halim Moestofa tersebut menjadi salah satu bukti bahwa interaksi dan hubungan sosial antar tokoh dan pemimpin di Kota Kediri sudah berjalan dengan baik. Pola hubungan tersebut senantiasa terus dijaga dan dilakukan secara terus menerus. Pola interaksi tersebut berlanjut hingga pemerintahan walikota berganti ke Samsul Ashar selama lima tahun, dan terus dilanjutkan ke walikota Abdullah Abu Bakar hingga sekarang. Dengan demikian hubungan segi tiga antara pemerintah/elit politik, pengusaha dan para tokoh agama dan masyarakat telah memberi dampak pada terciptanya situasi dan kondisi sosial dan politik di Kota Kediri dapat berjalan dengan stabil dan kondusif.

Wadah interaksi sosial yang lain di tingkat masyarakat bawah sejak pasca reformasi juga berjalan semakin intensif. Hal tersebut dapat dilihat melalui aktifitas keagamaan masyarakat dan pelestarian kesenian tradisional. Dengan demikian keberadaan kesenian tradisional jaranan di Kediri merupakan bagian dari sistem pelebagaan sosial. Sehingga secara struktural ia berfungsi dan saling berhubungan dengan sub-sub sistem yang lain. Secara fungsional kesenian tradisional ini berfungsi sebagai simbol untuk membentengi masyarakat desa agar tidak terjerumus pada tindakan yang merusak kerukunan dan kedamaian yang selama ini dirasakan masyarakat.

D. Model Integrasi Sosial Masyarakat Mataraman

Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi bagi masyarakat tersebut. Demikian pula dalam konteks masyarakat Kota Kediri, proses intergrasi sosial tersebut setidaknya terjadi pada tiga wilayah yakni ritual kepercayaan, berkesenian dan hubungan antaragama. Dari ketiga wilayah tersebut model integrasi sosial selalu mengandalkan faktor struktural maupun kultural.

Mencermati fenomena yang terjadi di masyarakat Kota Kediri, integrasi sosial dapat terbentuk dengan baik karena warganya bersepakat mengenai stuktur kemasyarakatan, nilai-nilai, dan norma serta pranata sosial di perlukan agar masyarakat tetap bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Hal tersebut tampaknya berlaku terutama dalam konteks kehidupan ritual slametan, berkesenian tradisonal dan hubungan antaragama.

Dalam kaitanya dengan ritual slametan, berkesenian tradisional dan hubungan antaragama yang ada di masyarakat Kota Kediri ternyata mampu melahirkan kondisi harmonis dalam kehidupan sehar-hari. Harmoni sosial yang dimaksud adalah suatu keadaan yang menggambarkan keseimbangan dalam kehidupan. Keharmonisan dalam masyarakat tersebut dapat terwujud karena masing-masing orang saling menghargai, saling menyayangi diantara anggota keluarga dan masyarakat.

Kondisi tersebut dapat diciptakan di tengah masyarakat, terutama disebabkan masyarakat Jawa menempatkan harmoni sosial sebagai cita-cita tertinggi dalam menata kehidupannya, baik di keluarga maupun di masyarakat. Artinya suatu harmoni tidak akan

tercapai jika rasa cinta dan kedamaian serta rasa saling menghargai tidak tertanam dalam diri manusia.

Jika dikaitkan dengan model integrasi sosial menurut Parekh, maka masyarakat di Kota Kediri lebih cenderung menggunakan model proseduralis dan asimilasionis. Hal tersebut tidak lepas dari sikap pemerintah daerah dan nilai-nilai yang dimiliki oleh orang Jawa sebagai masyarakat dominan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa masyarakat Kota Kediri sangat dipengaruhi oleh pandangan dan nilai-nilai budaya Jawa. Salah satu contohnya, banyak perkumpulan dan ikatan sosial maupun agama menggunakan istilah *paguyuban*. Kata *paguyuban* berasal dari kata *guyub*. Kata *guyub* ini mengacu pada salah satu ciri khas masyarakat yang mementingkan semangat kebersamaan (Koentjaraningrat, 1984).

Dalam konteks masyarakat mataraman di Kota Kediri, integrasi sosial model proseduralis diterapkan dalam kehidupan hubungan antaragama. Selain prinsip kerukunan atau harmoni dalam masyarakat sendiri telah tercipta, peran pemerintah daerah yang bersifat mengatur dan melindungi juga sangat tampak dalam setiap kebijakan dan kegiatan yang diadakan. Melalui wadah Paguyuban Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (PAUB-PK) pemerintah kota Kediri selalu melibatkannya dalam setiap program yang dicanangkan. Hubungan antar agama yang harmonis tersebut bahkan dijadikan dasar dalam membangun citra kota dengan nama “Kediri Harmoni”. Sebaliknya, bagi komunitas antar agama, kehadiran pemerintah tersebut juga sangat dibutuhkan sebagai pegangan, sehingga dengan peran tersebut pemerintah dapat menciptakan aturan dalam membentuk perilaku umum bagi setiap individu dan kelompok sehingga dapat secara leluasa menjalankan aktifitasnya dengan leluasa dan aman.

Masih terkait dengan model integrasi proseduralis, pemerintah melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah memberikan kewenangan berupa rekomendasi ketika ada permintaan pendirian rumah ibadah baru. Berlandaskan aturan yang bersumber dari Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri tersebut, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap komunitas umat beragama jika mau mendirikan tempat ibadah baru, baik berupa masjid, gereja, klenteng, pura dan wihara. Dengan posisi tersebut pemerintah harus memperlakukan secara adil dan memberikan hak yang sama bagi setiap pemeluk agama yang ada di Kota Kediri untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Sedangkan integrasi sosial model asimilasionis dalam konteks masyarakat mataram di Kota Kediri diterapkan melalui praktek kesenian tradisional dan ritual slametan. Dua kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan baik karena masing-masing kelompok lebih menekankan adanya persamaan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam pandangan model asimilasionis ini kesatuan dalam masyarakat akan tercipta jika ada kemauan dari setiap kelompok sosial dalam membangun pola kehidupan bersama berdasarkan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Biasanya kesepakatan tersebut muncul sebagai hasil dari proses interaksi dan dialog yang intensif sehingga menghasilkan pengertian bersama sebagai dasar dalam bersikap dan berperilaku.

Prinsip kerukunan tersebut terlihat dari pelaksanaan ritual slametan maupun dalam pelaksanaan pentas kesenian tradisional. Jika dalam ritual slametan, terjadi proses kebersamaan dalam pelaksanaan ritualnya, yakni dilibatkannya do'a-doa dari para tokoh agama sekitar desa untuk memimpin do'a, namun dalam pementasan kesenian tradisional proses kebersamaan dilakukan di luar acara pementasan, misalnya saat bulan ramadhan pentas kesenian jaranan diliburkan dengan alasan menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selain itu secara individu para pelaku kesenian tradisional jaranan berhubungan dengan baik dengan para tokoh dan komunitas pesantren melalui pertemuan-pertemuan informal maupun pertemuan sehari-hari dalam masyarakat.

Dengan menggunakan dua kegiatan tersebut, secara umum masyarakat Kota Kediri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Prinsip tersebut oleh masyarakat dijaga dengan baik. Akan tetapi, apa saja yang akan mengganggu kerukunan diatasi segera oleh seluruh warga masyarakat sehingga terhindar dari adanya konflik. Hal lain yang tampak menonjol dari pelaksanaan prinsip kerukunan itu ialah kemampuan menguasai emosi supaya tetap terkendali dan tidak mengganggu kerukunan masyarakat. Meskipun dari prinsip kerukunan itu sering timbul sikap berpura-pura yang mungkin merugikan diri sendiri meskipun kerugian tersebut juga tidak diperhitungkan.

Jika dicermati lebih mendalam, prinsip kerukunan oleh masyarakat Jawa selalu ditanamkan secara terus-menerus dan dijaga dengan baik. Akan tetapi, jika ada pihak-pihak yang akan mengganggu kerukunan segera diatasi oleh seluruh warga masyarakat sehingga terhindar dari adanya konflik. Hal lain yang tampak menonjol dari pelaksanaan prinsip kerukunan itu ialah kemampuan menguasai emosi supaya tetap terkendali dan tidak mengganggu kerukunan masyarakat. Dari prinsip kerukunan itu sering timbul sikap

berpura-pura yang mungkin merugikan diri sendiri meskipun kerugian tersebut tidak diperhitungkan.

Selain prinsip kerukunan, nilai dasar yang masih dipegang kuat oleh masyarakat Jawa di Kota Kediri adalah prinsip hormat. Prinsip ini mengatur hubungan anggota-anggota masyarakat Jawa secara hirarkis. Setiap orang Jawa akan segera tahu di mana ia harus berada pada waktu dan situasi tersebut, penggunaan bahasa Jawa yang bagaimana yang digunakan, bagaimana sikap yang harus diambil dalam menghadapi lawan bicaranya, dan lain sebagainya yang terkait dengan prinsip ini (Mulder N. , 1985).

Sikap hormat kepada yang lebih tua, baik karena umur maupun karena silsilah kekerabatan atau karena kedudukan yang lebih tinggi itu akhirnya membentuk struktur sosial masyarakat Jawa yang paternalistik. Artinya, kelakuan atasan dengan sendirinya dianggap benar dan dengan demikian menjadi standar moral yang akan ditiru oleh bawahannya.

Demikian kedua prinsip pokok yang menjadi sumber moral masyarakat Mataraman di Kota Kediri yang terlihat pada semua tatanan, kebiasaan, perbuatan, dan tingkah lakunya dalam hidup sehari-hari. Hal tersebut masih dipegang teguh dan dijaga kelangsungan hidupnya hingga sekarang.

Menurut Mulder, lahinya kultur harmoni sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Mataraman di Kota Kediri tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan mereka yang hidup sebagai petani. Kultur agraris tersebut lahir sebagai akibat dari kebiasaan mereka mengolah tanah dan menanamnya hingga suatu saat akan memanennya. Tidak jarang selama mereka melakukan hal tersebut terjadi komunikasi batin antara petani dengan tanaman dan tanah yang diolahnya. Salah satu cara melakukan komunikasi dengan tanah dan tanaman tersebut diwujudkan dalam bentuk ritual upacara tradisional, saat ingin memulai cocok tanam dan saat panen tiba. Dalam skala yang lebih luas lagi masyarakat Jawa secara kolektif juga melakukan ritual yang dilakukan secara rutin setahun sekali terhadap bumi, tanah air kelahirannya yang bernama upacara bersih desa. (Mulder N. , 1985)

Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka model integrasi sosial yang diterapkan oleh masyarakat Kota Kediri menggunakan model proseduralis dan Asimilasionis. Model integrasi sosial prosedurlis dapat ditemukan pada hubungan antaragama,

sedangkan model integrasi asimilasionis terdapat pada praktik budaya ritual slametan dan pentas kesenian tradisional. Keduanya berjalan serasi sesuai dengan dinamika masyarakat untuk selalu menjaga keseimbangan. Sehingga dalam konteks sosial budaya ketiga kegiatan tersebut terus dilestarikan sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan baik antar kelompok di masyarakat, sehingga tercipta suasana yang damai dan harmonis.

Hal tersebut selaras dengan pandangan hidup orang Jawa, bahwa harmoni sosial adalah suatu tugas yang harus dipahami oleh setiap orang Jawa untuk selalu menjaga kehidupan sosial selalu dalam keselarasan dan keseimbangan. Dalam menjaga kehidupan sosial dapat dilakukan dengan melakukan interaksi sosial berjalan dengan wajar tanpa ada tekanan-tekanan dan pemaksaan yang dapat menghambat kebebasan seseorang.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Parson, bahwa sistem kultur yang ada dalam masyarakat Kota Kediri yang dalam konteks penelitian ini meliputi kultur harmoni dalam kehidupan ritual slametan, kesenian tradisional dan hubungan antar agama, ternyata mampu mengikat sistem sosial lainnya. Bahkan kultur tersebut telah menjadi jembatan interaksi antar aktor dan menyatukannya dalam sistem sosial bersama. Dengan demikian kultur mempunyai kapasitas khusus untuk menjadi komponen sistem yang lain dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan sistem tindakan yang lain.

Daftar Pustaka

- Alfian, N. S. (1991). *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Astrid S. Susanto (1979) *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta
- Ayu Soetarto, 2004, Pendekatan kebudayaan dalam pembangunan Provinsi Jawa Timur, Jember, Kelompok Peduli Budaya dan Wisata Daerah Jawa Timur.
- Bikhu Parekh, (2008) *Rethinking Multiculturalism: Keragaman Budaya, dan Teori Politik*, Yogyakarta: Kanisius
- Chalik, Abdul. (2017). *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Geertz, Clifford. (2013). *Agama Jawa Abangan dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Geertz, H. (1983). *Keluarga Jawa*. Jakarta: Graffiti Pers.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Liliweri, A. (2016). *Konfigurasi Dasar Teori-Teori Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: Nusa Media.

- Mulder, N. (1985). *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan
- Mulder, N. (2001). *Mistisisme Jawa, Ideologi di Indonesia*. (N. Cholis, Penerj.) Yogyakarta: LKiS.
- R.Anderson, B. (2000). *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa*. Yogyakarta: Qalam.
- Ritzer, G. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Roqib, M. (2007). *Harmoni dalam kebudayaan Jawa: dimensi edukasi dan keadilan gender*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press .
- Subair. (2015). *Abangan, Santri, Priyayi: Islam dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa*. Dialektika.
- Subakir, A. (2003). *Merajut Persaudaraan Sejati Antar Umat Beragam, 5 Tahun PKUB Kota Kediri*. Kediri: Sosekumdik dan Litbang PKUB Kota Kediri.
- Suseno, M. (1985). *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).